



RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KEBONAGUNG TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KEBONAGUNG**

JL. Raya Semarang – Purwodadi Km.36 Telepon (0292) 5135754KebonagungKodePos 59573

2024

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Kecamatan Kebonagung Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah dan pedoman pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mengacu pada Pemendagri no 86 tahun 2017 maka Perangkat Daerah menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Renja Tahun 2025 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan, diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia . Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Kebonagung dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

1.1.1 Pengertian Rancangan Renja SKPD

Merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun. Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan

berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Kantor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak yang Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2016 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan serta tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan efisien, maka penyusunan dan penetapan Renja SKPD menjadi bersifat pasti, yaitu sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara berkaitan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kebonagung Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung Tahun 2021-2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Demak sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kebonagung berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Serta berpedoman pada aturan pemendagri no 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
29. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak;
30. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor

55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;

31. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kebonagung Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya. Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kebonagung Tahun 2025 adalah :

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun di Tahun 2025;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kebonagung Tahun 2024 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2025 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika Renja PD

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Menguraikan tentang kondisi pelayanan Kecamatan Kebonagung. Bab ini juga menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja 2023.

BAB III

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tentang tujuan dan sasaran beserta target kinerja Perangkat Daerah

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2025 beserta kerangka pendanaannya.

BAB V

Penutup

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KEBONAGUNG TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kebonagung

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kebonagung tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Kebonagung sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Kebonagung berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Kebonagung tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 mencakup pokok-pokok sebagai berikut :

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sebanyak 6 program, 14 kegiatan dan 45 sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023, adalah sebagai berikut :
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi sebesar Rp. 2.202.863.767,- atau 91,45% dari total anggaran Rp. 2.495.730.200,-. Hal ini menunjukkan serapan anggaran belum maksimal dikarenakan pada tahun berjalan ada beberapa ASN yang purna tugas, tetapi target kinerja tercapai 100 %. Adapun rincian realisasi dari program ini sebagai berikut :
 - 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : Rp. 1.352.007.390,-atau 83,5% dari anggaran Rp. 1.616.181.000,-
 - 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah : Rp. 53.117.000,- atau 99,04% dari anggaran Rp. 53.634.500,-
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 595,669.200,- atau 95 % dari anggaran Rp. 609.166.540,-
 - 4) Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Rp. 31.325.000,- atau 94,98% dari anggaran Rp. 32.980.005,-
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 12.871.276,- atau 61,26% dari anggaran Rp. 21.010.000,

- 6) Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 128.325.801,- atau 97,2% dari anggaran Rp. 132.027.056,-
 - 7) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Rp. 29.568.100 atau 96,19% dari anggaran Rp. 30.740.000,-
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, realisasi sebesar Rp. 12.860.000,- atau 98,10% dari total anggaran Rp. 13.200.000,-. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa seluruh kegiatan terlaksana dengan baik dan hampir mencapai target, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan : Rp. 12.860.000,- atau 98,10% dari anggaran Rp. 13.200.000,-
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, realisasi sebesar Rp. 49.993.200,- atau 95,49% dari total anggaran Rp. 52.355.100,-. Realisasi tersebut menunjukkan jika kegiatan sudah terlaksana dengan baik, tetapi ada beberapa sub kegiatan yang tidak terserap dengan sempurna, akan tetapi target kinerja tercapai 100%. adalah pelaksanaan dari kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa : Rp. 17.051.700,- atau 98,25% dari anggaran Rp. 17.355.100,-
 - 2) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan : Rp. 32.941.500,- atau 94,12% dari anggaran Rp. 35.000.000,-
- d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, realisasi sebesar Rp. 78.675.500,- atau 98,34% dari total anggaran Rp. 80.000.000,-. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar dan target kinerja tercapai 100%. Adapun perincian pelaksanaan dari kegiatan adalah sebagai berikut:
- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan :

- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan realisasi anggaran Rp. 73.836.000,- atau 98,45% dari anggaran Rp. 75.000.000,-
- 2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Koordinasi sinergi dengan Perangkat Daerah yang bertugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau Kepolisian Republik Indonesia dengan realisasi anggaran Rp.4.839.500 atau 96,79% dari pagu Rp. 5.000.000,-
- e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, realisasi anggaran sebesar Rp. 53.328.700 atau 95,18% dari total anggaran Rp. 56.029.800,-. Realisasi tersebut menunjukkan ada sub kegiatan yang belum bisa dilakukan secara maksimal, akan tetapi target kinerja sudah tercapai 100%, Penjelasannya dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Fasilitasi penyusunan desa dan peraturan kepala desa,realisasi anggaran Rp. 6.961.500- atau 92,20% dari pagu Rp.7.550.000,-
 - 2) Fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa, realisasi Rp. 11.412.500,- atau 91,32% dari pagu sebesar Rp. 12.500.000,-
 - 3) Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, realisasi Rp. 12.082.700 atau 96,67% dari pagu sebesar Rp. 12.500.000,-
 - 3) Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa, realisasi Rp.6.830,000 atau 100% dari pagu sebesar Rp. 6.830.000,-
 - 4) Fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan, realisasi Rp. 16.042.000,- atau 98% dari pagu sebesar Rp. 16,644.800,-
- f) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum, realisasi sebesar Rp. 10.880.000,- atau 100% dari anggaran Rp. 10.880.000,-. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan sempurna dan tentu saja target kinerja tercapai 100%, Hal tersebut dapat dilihat dari perincian dari pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dalam satu

sub bidang kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kebonagung sampai dengan triwulan II tahun 2023 sesuai dengan target kinerja yang direncanakan, jadi tidak ada yang melebihi dari target kinerja.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan : tidak ada, karena pada dasarnya semua program/kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
 - b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan :
 - 1) Dukungan APBD Kabupaten Demak
 - 2) Kerjasama super team yang solid
 - 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, yang dituangkan dalam berita acara penyampaian hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja program/kegiatan.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel 2.1 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kebonagung

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun 2024	Tingkat realisasi renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kec Kebonagung yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen penganggaran	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang/bulan	14 orang/bulan	14 orang/bulan	14 orang/bulan	100	19 orang/bulan	19 orang/bulan	100

7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Honorarium ASN dan Non ASN pendukung pelaksanaan tugas yang terbayar	49	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	100
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.05.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	22 orang	100	100
7.01.01.2.05.09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	99 orang	11 orang	17 orang	17 orang	100	17 orang	100	100
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	80 orang	80 orang	1 dokumen	1 dokumen	100	80 orang	100	100
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	60 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100	1 paket	100	100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100	1 paket	100	100
	Penyediaan bahan logistik	Jumlah bahan logistik yang tersedia	60 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100	0	0	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100	1 paket	100	100
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100	3 paket	100	100
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang diikuti dan diselenggarakan	60 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100	1 paket	100	100
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	35	4	100	100	100	100	100	100

7.01.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 unit	0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	4 unit		0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	7 unit	2 unit	3 unit	3 unit	100	4 unit	4 unit	100
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	12 unit	0	3 unit	3 unit	100	0	0	100
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	7 unit	2 unit	0	0	0	2 unit	2 unit	100
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang urusan yang tersedia	25	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	12 paket	200 paket	12 paket	12 paket	100	1 paket	1 paket	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terpenuhi	60 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100	1 paket	1 paket	100
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	135	100	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	0	0	0	0	0	1 unit	1 unit	100
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100	12 unit	12 unit	100
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100	3 unit	3 unit	100
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	95 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100	15 unit	15 unit	100

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi	10 unit	0	5 unit	5 unit	100	0	0	0
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung/ bangunan yang direhabilitasi	40 unit	3 unit	5 unit	5 unit	100	3 unit	3 unit	100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan	0	0	0	0	0	100	100	100
	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	0	0	0	0	1 laporan	1 laporan	100
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	14	101	100	100	100	100	100	100
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 laporan	0	0	0	0	1 laporan	1 laporan	100
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 laporan	0	2 laporan	2 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa	8	1	100	100	100	100	100	100

7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen perencanaan hasil Musrenbangcam	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Pelatihan UMKM	30 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Keamanan Wilayah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	22	3	100	100	100	100	100	100
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah wilayah yang menjadi cakupan patroli keamanan lingkungan, Jumlah wilayah yang menjadi cakupan penanganan Covid-19	14 desa	42 desa	0	0	0	0	0	0
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah peserta Forum Ulama Umaro yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	19	42	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	100
7.01.04.2.01.03	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	1 kegiatan	0	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.05.2..01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	14	2	100	100	100	100	100	100
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	144 orang	10	1	1	100	100 orang	100 orang	100
7.01.06	PROGAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Asset Pemerintahan Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi/pembinaan/sosialisasi/bimbingan teknis yang dilaksanakan	10	2	100	100	100	100	100	100
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	70	0	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	70	0	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100

7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	umlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	70	0	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	umlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5	5	1 dokumen	1 dokumen	100	0	0	0
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya didampingi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya	70	28	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Tahun 2023

Evaluasi pelaksanaan program prioritas tahun 2023 Kecamatan Kebonagung adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Imaro Kecamatan Kebonagung tahun 2023 dilaksanakan selama 3 kali kegiatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 73.836.000,- atau 98,45%
2. Pelatihan ketrampilan UMKM dan pendampingan perijinan usaha mikro Kecamatan Kebonagung tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 1 kali kegiatan yang diikuti 100 peserta dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- atau 100%

Tabel yang perlu disajikan adalah 2.2. dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023

NO	Program Unggulan/ Rencana Implementasi /Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	2022		2023						2024		Perkiraan realisasi s.d. 2024		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16	19
1	PENYELENGGAR AAN FORUM KOMUNIKASI ULAMA-UMARO	Jumlah FKUU yang dilaksanakan	Kegiatan	1	4	3	75.000.000	3	75.000.000	3	73.836.000	100%	98%	3	75.000.000	9	75.000.000	7.01.04.2.01.02
2	PELATIHAN KETRAMPILAN UMKM DAN PENDAMPINGAN PERIZINAN USAHA MIKRO	Jumlah Pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan ketrampilan dan pendampingan perizinan usaha mikro	Orang	100	100	100	25.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100%	100%	100	50.000.000	300	50.000.000	7.01.03.2.01.02

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan mendukung pencapaian misi ke-2 Kabupaten Demak, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel.

Untuk mencapai misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dalam penyusunan Rencana Strategis, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai oleh Kecamatan Kebonagung selama lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah rata-rata indeks kepuasan masyarakat (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat).

Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kebonagung pada tahun 2023 adalah 81,72%) yang diambil berdasarkan survey terhadap 100 responden, yang dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu di bulan Maret s/d Juni dan Bulan September s/d November.

Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat) dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kebonagung
Kabupaten Demak

[illegible]

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Kebonagung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tersebut, maka ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak. Adapun tugas pokok OPD Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kebonagung adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal.
 - a. Jumlah ASN masih belum sesuai kebutuhan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
 - b. Kurangnya semangat kerja ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
 - c. Pemanfaatan pelayanan berbasis teknologi informasi belum maksimal.
 - d. Kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan masih kurang.
2. Potensi pemberdayaan masyarakat belum terkelola dengan baik.
 - a. Belum berkembangnya BUMDES karena belum berfungsi secara maksimal.
 - b. Masih rendahnya pemahaman tugas, fungsi dan kewajiban kelembagaan desa dalam proses penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa.
 - c. Masih adanya Desa yang tertinggal atau menjadi Desa Termiskin di wilayah Kecamatan Kebonagung yang perlu pendampingan.
3. Keamanan dan kenyamanan lingkungan untuk mendukung aktivitas masyarakat belum merata.
 - a. Jumlah anggota Linmas di beberapa desa masih belum sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masih kurang.
 - c. Masih adanya pelanggaran terhadap Perda.
4. Perlunya upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa dari level masyarakat terkecil.
 - a. Masih adanya potensi konflik di masyarakat.
 - b. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.
5. Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pemerintah desa belum optimal.
 - a. Kurangnya kedisiplinan, kemampuan serta pengetahuan bagi pengelola pemerintahan desa.
 - b. Kurangnya SDM yang menguasai pengetahuan dan kemampuan teknologi informasi di tingkat desa,

sedangkan jumlah aplikasi yang dikelola oleh desa itu banyak sekali.

- c. Adanya Kegiatan Pilihan Serentak Legislatif dan Pilkada.

Berdasarkan isu-isu penting yang dihadapi oleh Kecamatan Kebonagung, maka tindak lanjut yang harus dilakukan dalam perumusan program dan kegiatan adalah :

1. Memberdayakan jumlah ASN yang ada dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
2. Meningkatkan kualitas dan etos kerja ASN melalui program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur.
3. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Pemerintah Desa melalui pendidikan dan pelatihan serta pembinaan.
4. Peningkatan SDM bagi Lembaga Desa dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat desa melalui musrenbangcam.
6. Meningkatkan kualitas SDM pelaksana pembangunan di tingkat desa melalui Pelatihan aparatur Pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa dan keuangan desa.
7. Monitoring dan fasilitasi BUMDes.
8. Pelatihan Masyarakat lewat kegiatan UMKM guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
9. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat melalui siskamling.
10. Meningkatkan keamanan masyarakat dalam menghadapi Pilihan Serentak.
11. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya taat aturan dan hukum yang berlaku sehingga akan menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat.
12. Meningkatkan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui forum komunikasi ulama umaro, upacara hari-hari besar nasional dan daerah serta penyelenggaraan pentas seni dan budaya.

2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 terdapat

sub-sub kegiatan yang besaran pagu berubah, maka dirumuskan dalam Hasil Analisis Kebutuhan tahun 2024, sebagai berikut :

Berdasarkan Rancangan awal Renja RKPD Tahun 2025 terdapat Program yang besaran pagunya berubah, diantaranya sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik semula Rp. 60.000.000,00 Menjadi Rp 35.000.000,00 Terdapat pengurangan anggaran sebesar RP 15.000.000,00.
2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan semula Rp 75.000.000,00 menjadi Rp 100.000.000,00 terdapat penambahan pagu anggran pada sub kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan sebesar 25.000.000,00.
3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum semula 175.000.000,00 menjadi 125.000.000,00, terdapat pengurangan pada sub kegiatan sinergitas dengan kepolisian sebesar 25.000.000 (tidak ada kegiatan pemilu) dan sub kegiatan harmonisasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebesar 25.000.000,00
4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum semula Rp 35.000.000,00 menjadi Rp 30.000.000,00, terdapat pengurangan anggaran dari sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp 5.000.000,00
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdapat penambahan anggaran sebesar Rp 5.000.000,00 pada sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang semula Rp 15.000.000,00 menjadi Rp 20.000.000,00
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mengalami perubahan besaran pagu, diantaranya
 - a. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN yang semula Rp 2.156.187.261,00 menjadi 1.761.524.000.

Berkurangnya sub ini karena adanya pengurangan jumlah ASN

- b. Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang semula Rp 157.753.443,00 menjadi Rp 124.519.700. Berkurangnya sub kegiatan ini karena adanya pengurangan jumlah non ASN
- c. Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian mengalami penambahan anggaran sejumlah 52.000.000, yakni ada penambahan anggaran dari sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dan sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
- d. Jumlah Mebel yang dipelihara semula Rp. 3.932.000,00 menjadi Rp. 10.000.000,00. Bertambah karena perbedaan harga pada kataloq penawaran
- e. Jumlah gedung kantor dan bangunan/bangunan lain yang dipelihara semula Rp. 20.000.000 menjadi Rp. 100.000.000,00 karena menjadi belanja prioritas untuk pemeliharaan rumah dinas camat
- f. Jumlah paket peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan semula Rp. 13.250.000,00 menjadi Rp. 20.000.000,00
- g. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD semula Rp. 20.000.000,00 menjadi Rp. 40.000.000,00
- h. Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah bertambah menja 155.400.000,00 dikarenakan ada penambahan barang milik daerah yang diperlukan yakni pada sub kegiatan peralatan dan mesin lainnya dan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya
- i. Jumlah tagihan listrik, air, telepon semula Rp14.535.689,00menjadi Rp. 19.500.000,00 karena ada penambahan pembayaran fasilitas internet

Hasil Analisis Kebutuhan tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan prioritas kebutuhan dan anggaran berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten.

Secara lengkap disajikan dalam tabel 2.5 sebagai berikut :

abel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah: Kantor Kecamatan Kebonagung

No	Ranwal Renja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kebonagung	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang baik	100%	60.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kebonagung	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang baik	100%	35.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kebonagung	Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan	100%	10.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kebonagung	Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan	100%	10.000.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	10.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	10.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kebonagung	Tercapainya pelaksanaan urusan pemerintahan yang baik	100%	25.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kebonagung	Tercapainya pelaksanaan urusan pemerintahan yang baik	100%	25.000.000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	56 lapoeran	25.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	25.000.000	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kebonagung	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	-100%	75.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kebonagung	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	-100%	100.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kebonagung	- Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa		75.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kebonagung	- Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa	-	100.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kebonagung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyar ak atan	25.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kebonagung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyar ak atan	25.000.000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	50.000.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	75.000.000	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kebonagung	Cakupan keamanan wilayah	100%	175.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kebonagung	Cakupan keamanan wilayah	100%	125.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kebonagung	jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban		175.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kebonagung	jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban		125.000.000	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48 Laporan	75.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48 Laporan	50.000.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	100.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	75.000.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kebonagung	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	35.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kebonagung	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	100%	30.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kebonagung	jumlah penyelenggaraan urusan umum		35.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kebonagung	jumlah penyelenggaraan urusan umum		30.000.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Kebonagung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 orang	25.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Kebonagung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 orang	20.000.000	

	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14 Laporan	10.000.000	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	10.000.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kebonagung	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa	100%	80.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kebonagung	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa	100%	85.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kebonagung	jumlah kegiatan / fasilitasi / pembinaan / sosialisasi / bimbingan teknis	4 Dokumen	80.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kebonagung	jumlah kegiatan / fasilitasi / pembinaan / sosialisasi / bimbingan teknis	4 Dokumen	85.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	15.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	20.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	20.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	25.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	25.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	25.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	25.000.000	

6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kebonagung	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100%	2.601.576.393	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kebonagung	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100%	2.457.543.700	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kebonagung	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	4.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kebonagung	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	4.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kebonagung	Jumlah pemenuhan gaji ASN tercapainya administrasi keuangan kecamatan yang tertib	100%	2.313.940.704	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kebonagung	Jumlah pemenuhan gaji ASN tercapainya administrasi keuangan kecamatan yang tertib	100%	2.313.940.704	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kebonagung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.156.187.261	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kebonagung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.761.525.000	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	157.753.443	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	124.519.700	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kebonagung	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	50.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kebonagung	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	102.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Kebonagung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Kebonagung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	52.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kebonagung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	25.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kebonagung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	50.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kebonagung	Jumlah pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	51.100.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kebonagung	Jumlah pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	78.100.000,	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kebonagung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kebonagung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kebonagung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.250.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kebonagung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kebonagung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.840.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kebonagung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kebonagung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8.427.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kebonagung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	12 Dokumen	4.044.960	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kebonagung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.600.000	

			Disediakan								
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	20.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121 Laporan	40.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kebonagung	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		55.000.000,	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kebonagung	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		155.400.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kebonagung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kebonagung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	77.700.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kebonagung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kebonagung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	77.700.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kebonagung	Jumlah materai tagihan listrik, air telepon terbayar tersediannya jasa penunjang kantor kecamatan	100%	22.035.689	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kebonagung	umlah materai tagihan listrik, air telepon terbayar tersediannya jasa penunjang kantor kecamatan	-	23.500.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	19.535.689	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kebonagung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	19.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kebonagung	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	80.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	208.500.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kebonagung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kebonagung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	75.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kec. Kebonagung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	4.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kec. Kebonagung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kebonagung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	8.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kebonagung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kebonagung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kebonagung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kebonagung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kebonagung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	
JUMLAH					2.976.578.393					2.832.543.700	

.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan termasuk dalam pemangku kepentingan atau perangkat daerah yang mengusulkan program dan kegiatan (berdasarkan hasil musrenbangcam) kepada perangkat daerah terkait, terdapat 55 usulan kegiatan atau pekerjaan yang disampaikan pada forum musrenbangcam th 2024 dan hanya 15 usulan pekerjaan yang sudah diverifikasi sedang 35 usulan sisanya belum terverifikasi .

Tabel 2,6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Demak Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Kebonagung

No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi. Fungsi Kecamatan Kebonagung sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kecamatan Kebonagung juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

Upaya pemerintah dalam penanganan stunting tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Terkait kebijakan nasional tersebut, Kecamatan Kebonagung juga berperan aktif dalam mendukung program nasional penanganan stunting. Dukungan terhadap program nasional penanganan stunting tersebut tertuang dalam program pemerintahan dan pengawasan desa.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung terkait dengan misi RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026. Sehubungan dengan penjabaran misi Pemerintah Kabupaten Demak: Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya dan serta Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran. maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Kebonagung adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kebonagung dan Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Kebonagung dalam jangka waktu satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Rencana Strategis dalam jangka waktu lima tahun mendatang dengan periode pembangunan 2021-2026. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kebonagung adalah Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Kebonagung dan terwujudnya pelayanan publik yang responsif.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Kebonagung beserta indikatornya, dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Target Renja 2025
1	Tujuan :		
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kebonagung	Nilai SAKIP Kecamatan Kebonagung	73,50
	Sasaran		
	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Kebonagung	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Kebonagung yang mencapai target	100 %
2	Tujuan :		
	Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,33
	Sasaran		
	Terwujudnya pelayanan publik yang Responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi misi bupati terpilih 2021-2026, telah ditetapkan tujuan yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Kebonagung, yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Kebonagung serta meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kebonagung.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan 2 sasaran yang terbagi menjadi 6 program, 13 kegiatan, dan 37 sub kegiatan dalam Penyusunan Renja tahun 2025 ini.

Rincian program dan kegiatan dalam rencana kerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- A. Program yang mendukung misi : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya, meliputi ;
 - 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 2. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 3. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- B. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meliputi program;
- 1. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 2. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- C. Sedangkan untuk mendukung program penurunan angka stunting di kecamatan Kebonagung, dimasukkan pada Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, sub kegiatan :
- 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam renja tahun 2025 sebanyak 6 program, 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 2.832.543.700,- Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN KEBONAGUNG KAB. DEMAK
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENS TRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN KEBONAGUNG						2.632.543.700,00						3.275.536.742,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						515.000.000,00							513.887.294,00	
	7.01	KECAMATAN						515.000.000,00							513.887.294,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	-			100 %	140.000.000,00						-	38.389.356,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	40.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Tindak Lanjut Reformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara individual dan kolektif	-	-	16.854.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				121 Laporan	40.000.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Tindak Lanjut Reformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara individual dan kolektif	-		16.854.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Keldesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih adaptif dan pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat		15.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang baik	-			100 %	25.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih adaptif dan pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat	-	30.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Keldesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih adaptif dan pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat		30.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif	-			100 %	100.000.000,00						-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa	-			100 %	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Pemerintahan Desa 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan kolaboratif 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan kolaboratif	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan kolaboratif 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan kolaboratif	Masyarakat	-	105.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semur KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Pemerintahan Desa 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan kolaboratif 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan kolaboratif	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan kolaboratif 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan kolaboratif	Masyarakat		30.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semur KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Pemerintahan Desa 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan kolaboratif 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan kolaboratif	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan 2. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan 3. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan 4. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat	Masyarakat		75.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan keamanan wilayah	-			100 %	125.000.000,00						-	190.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterlaksanaan dan Keterlaksanaan Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan keterlaksanaan dan keterlaksanaan	-			100% Laporan	125.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Tata kelola Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat	-	190.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kali Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Tata kelola Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat		90.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi/ Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	75.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kali Desa Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kali Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Tata kelola Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan fasilitasi kehidupan beragama	Masyarakat		100.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	-			100 %	30.000.000,00						-	47.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTISTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan umum	-			100 %	30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukbank am Dan Tm reformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat	-	47.500.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				80 Orang	20.000.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukbank am Dan Tm reformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat		30.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Dilaporkan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukbank am Dan Tm reformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat		17.500.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Terlibat Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa	-			100 %	85.000.000,00						-	87.997.938,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Demak, Kebonegung, Semus KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Pemerintahan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	ASN		18.500.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.500.000,00	Kab. Demak, Kebonegung, Semus KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Pemerintahan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	ASN		8.932.820,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.800.000,00	Kab. Demak, Kebonegung, Semus KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Pemerintahan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	ASN		5.287.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSITRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	155.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Pemerintahan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	ASN	-	43.700.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	X.XX.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	77.700.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semus Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Pemerintahan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	ASN		35.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	77.700.000,00	Kab. Demak, Kebonagung, Semus Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Pemerintahan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	ASN		8.700.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Jumlah material tagihan listrik, air telepon terbayar tersedianya jasa penunjang kantor kecamatan	-			100 % 0 %	23.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Kemajuan Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaborasi 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	ASN	-	28.382.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Kemajuan Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaborasi 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	ASN		4.382.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	19.500.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Demak, Kebonagung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Kemajuan Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaborasi 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	ASN		24.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	8.500.000,00	Kab. Demak, Kabonegung, Semua Kali/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperluas Stabilitas Politik umum yang lebih adaptif dan kolaborasi Publik	4. Peningkatan tata kelola perencanaan yang lebih adaptif dan kolaborasi Publik 2. Peningkatan tata kelola perencanaan publik berbasis smart city	ASN		8.992.171,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Demak, Kabonegung, Semua Kali/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperluas Stabilitas Politik umum yang lebih adaptif dan kolaborasi Publik	4. Peningkatan tata kelola perencanaan yang lebih adaptif dan kolaborasi Publik 2. Peningkatan tata kelola perencanaan publik berbasis smart city	ASN		10.000.000,00	KECAMATAN KEBONAGUNG
			J U M L A H					2.832.543.700,00							3.275.538.742,00	

4.2 Program Prioritas dan Rencana Implementasi

Untuk mencapai Program Prioritas yang berupa FKUU dan UMKM, Kecamatan Kebonagung mengalokasikan sebesar Rp. 150.000.000,-. Dengan rincian untuk anggaran kegiatan FKUU sebesar Rp. 75.000.000,- dan anggaran kegiatan UMKM sebesar Rp. 75.000.000,-.

Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama Umaro, dimana akan dilaksanakan dalam 4 kali kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-. Sedangkan Kegiatan Pelatihan UMKM, akan dilaksanakan pada Desa Tertinggal dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-

Adapun Tabel rencana program prioritas dan rencana implementasi sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2024

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	REALISASI s.d 2023		PROYEKSI 2024		TARGET 2025		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI ULAMA-UMARO	Jumlah FKUU yang dilaksanakan	Kegiatan	1	6	148.836.000	3	75.000.000	4	75.000.000	17	7.01.04.2.01.02	
2	PELATIHAN KETRAMPILAN UMKM DAN PENDAMPINGAN PERIZINAN USAHA MIKRO	Jumlah Pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan ketrampilan dan pendampingan perizinan usaha mikro	Orang	100	200	67.941.500	100	50.000.000	100	75.000.000	500	7.01.03.2.01.02	

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Penyusunan program dan kegiatan dalam Renja 2025 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dilakukan pemutakhiran berdasarkan Kepmendagri Nomor 50-3708 tahun 2020. Sedangkan untuk pengusulan Renja 2025 dilakukan input melalui SIMDA (FMIS). Kecamatan Kebonagung mendapat Belanja Prioritas sebesar Rp 100.000.000,- yang akan diperuntukkan pemeliharaan atap rumah dinas Camat Kebonagung.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Renja Kecamatan Kebonagung Tahun 2025 disusun untuk menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kebonagung tahun 2025. Untuk itu ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Seluruh elemen di lingkungan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Kecamatan Kebonagung Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.
- 2) Renja Kecamatan Kebonagung Tahun 2025 dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahun 2025 dan menjadi acuan bagi sekretariat dan seksi-seksi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.
- 3) Selama pelaksanaan renja dimaksud, harus dilakukan pengendalian, yaitu monitoring dan evaluasi sehingga dapat diketahui faktor keberhasilan maupun faktor penghambat apabila program dan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan.
- 4) Renja 2025 dijadikan dasar pendampingan pengentasan angka kemiskinan melalui kegiatan pendampingan UMKM

dilaksanakan di desa tertinggal.

- 5) Renja 2025 dapat dilakukan perubahan apabila dalam waktu berjalan ada penyesuaian prioritas kebutuhan dan anggaran sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Demak.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja PD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya Rancangan Renja PD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Kebonagung, semoga bermanfaat dan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kebonagung.

Lampiran 1.

PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026

DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN
KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

SEMULA								MENJADI							
URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
X	X X	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA		Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	X	X X	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA			
X	X X	1	2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	Dokumen	X	X X	1	1. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUR / URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR / URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
X	X X	1	2. 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	X	X X	1	1. 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
X	X X	1	2. 01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	X	X X	1	1. 01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen
X	X X	1	2. 01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersediannya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	X	X X	1	1. 01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersediannya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen
X	X X	1	2. 01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan	Laporan	X	X X	1	1. 01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan	Laporan

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
X	X X	1	20 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	X	X X	1	10 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
X	X X	1	20 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bu lan	X	X X	1	10 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bu lan
X	X X	1	20 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	X	X X	1	10 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
X	X X	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/K OTA		Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan	Persen	X	X X	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/K OTA					
X	X X	1	20 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	Persen	X	X X	1	10 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
X	X X	1	20 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	X	X X	1	10 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
X	X X	1	20 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikiti sosialisasi peraturan perundang- undangan	orang	X	X X	1	10 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikiti sosialisasi peraturan perundang- undangan	orang
X	X X	1	20 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Persen	X	X X	1	10 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah					

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
X	X X	1	20 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	X	X X	1	10 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
X	X X	1	20 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	X	X X	1	10 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
X	X X	1	2. 06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	X	X X	1	10 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
X	X X	1	20 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	X	X X	1	10 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
X	X X	1	20 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	X	X X	1	10 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
X	X X	1	20 6	9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	X	X X	1	10 6	9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
X	X X	1	2. 06	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlakasananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata	Dokumen	X	X X	1	10 6	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlakasananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata	Dokumen
X	X X	1	2. 06	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	X	X X	1	10 6	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
X	X X	1	20 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang diadakan	unit	X	X X	1	10 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
X	X X	1	20 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	X	X X	1	10 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
X	X X	1	20 7	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	X	X X	1	10 7	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
X	X X	1	20 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	X	X X	1	10 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
X	X X	1	20 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	X	X X	1	10 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit
X	X X	1	2. 07	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	X	X X	1	10 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X	X X	1	20 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Persen	X	X X	1	10 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
X	X X	1	20 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	X	X X	1	10 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUR / URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR / URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
X	X X	1	20 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	X	X X	1	10 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
X	X X	1	20 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang terpelihara	Unit	X	X X	1	10 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
X	X X	1	2. 09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/jabatan yang terpelihara	Unit	X	X X	1	10 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/jabatan yang terpelihara	Unit

SEMULA								MENJADI								
URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
X	X X	1	20 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	X	X X	1	10 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
X	X X	1	20 9	5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Unit	X	X X	1	10 9	5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
X	X X	1	2. 09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	X	X X	1	10 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin yang terpelihara	Unit
X	X X	1	20 9	9	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	X	X X	1	10 9	9	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit
X	X X	1	20 9	1 0	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	X	X X	1	10 9	1 0	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN								
X	X X	1	2. 09	1 1	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	X	X X	1	10 9	1 1	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit
7					UNSUR KEWILAYAHAN				7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	1				KECAMATAN				7	1				KECAMATAN			
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	Persen	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK			
7	1	2	20 1		Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	7	1	2	20 1		Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
7	1	2	20 1	1	Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	7	1	2	20 1	1	Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan
7	1	2	20 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah laporan Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Laporan	7	1	2	20 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
7	1	2	2. 04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	7	1	2	2. 04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN			
7	1	2	204	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	7	1	2	204	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	Persen	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	1	3	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah lembaga kemasyarakata n yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan desa	Lembaga Kemasyar akatan	7	1	3	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7	1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan di desa	Lembaga Kemasyar akatan	7	1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan di desa	Lembaga Kemasyar akatan

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR URUSAN / BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
7	1	3	20 1	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	7	1	3	20 1	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan keamanan wilayah	Persen	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7	1	4	20 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraa n ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	laporan	7	1	4	20 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum			

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUR / URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR / URUSAN / BIDANG PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN				
7	1	4	20 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	7	1	4	20 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	1	4	20 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	7	1	4	20 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan
7	1	4	20 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada yang dilaksanakan	Laporan	7	1	4	20 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
7	1	4	20 2	1	Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	7	1	4	20 2	1	Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM		Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM			
7	1	5	20 1		Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah laporan penyelenggaraa n urusan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	laporan	7	1	5	20 1		Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR / URUSAN / BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR / URUSAN / BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
7	1	5	20 1	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	7	1	5	20 1	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang

SEMULA									MENJADI										
URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN		
7		1	5	20 1	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Laporan	7		1	5	20 1	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Laporan
7		1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH N DESA		Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan aset pemerintah desa	Persen	7		1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH N DESA			
7		1	6	20 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	7		1	6	20 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN								
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen
7	1	6	201	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	7	1	6	201	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen

SEMULA									MENJADI												
URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR URUSAN / BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/K OTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN			
7		1		6	20 1	1 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakata n	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakata n	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakata n	Dokumen	7		1		6	20 1	1 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakata n	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakata n	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakata n	Dokumen